

ANALISIS PELAKSANAAN PROGRAM PROMOSI KESEHATAN DALAM PENCEGAHAN STUNTING DI PUSKESMAS

**BERNADETHA¹, NUR HAYATI^{2*}, YUDI ADNAN³, SUSILO WIRAWAN⁴, RIDA'
MILLATI⁵**

Jurusan Promosi Kesehatan, Poltekkes Kemenkes Kaltim¹, Prodi S1 Administrasi Kesehatan,
Institut Kesehatan dan Teknologi Buton Raya^{2*}, Fakultas kedokteran dan Ilmu kesehatan,
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar³, Prodi D3 Gizi, Poltekkes Kemenkes
Yogyakarta⁴, Fakultas Keperawatan dan Ilmu Kesehatan, Universitas Muhammadiyah
Banjarmasin⁵

bernadetha93@yahoo.com¹, nurrhayati2908@gmail.com^{2*}, yudi.adnan@yahoo.com³,
susilo.wirawan@poltekkesjogja.ac.id⁴, rida.millati@unbjm.ac.id⁵
Correspondence Author: Nur Hayati, nurrhayati2908@gmail.com

Abstract: Based on the results of the 2018 Basic Health Research, the national prevalence of stunting in 2018 was 30.8 percent. The prevalence consists of 11.5% very short and 19.3% short. Based on the results of the 2018 Riau Province Riskesdas by the Indonesian Ministry of Health, the incidence of stunting in Riau Province was 25.7%. Salo Regency is one of the highest ranked for stunting rates in Riau Province at (31.99%). The purpose of this study was to analyze how the health promotion program in the prevention of stunting at Puskesmas Salo Kiri Hilir. The study used an analytical qualitative method conducted at the Salo Kiri Hilir Health Center to 4 informants including promkes holders, nutrition holders. Mothers who have stunted children and the Head of the Puskesmas. The results showed that in general the implementation of the promkes program at the Salo Kiri Hilir Health Center has been running, but there are obstacles such as limited budget resources in supporting the implementation of the promkes program at the Salo Kiri Hilir Health Center. It is suggested that the Puskesmas Salo Kiri Hilir can be used as material for evaluating the Health promotion program at Puskesmas Salo Kiri Hilir in accordance with budget capacity.

Keywords: Budget, Health Promotion, Health Center

Abstrak: Berdasarkan hasil Riset Kesehatan Dasar tahun 2018, prevalensi stunting secara nasional tahun 2018 adalah 30,8 persen. Prevalensi tersebut terdiri dari 11,5% sangat pendek dan 19,3% pendek. Berdasarkan hasil Riskesdas Provinsi Riau tahun 2018 oleh Kementerian Kesehatan RI, angka kejadian balita stunting di Provinsi Riau sebanyak 25,7 %. Kabupaten Kampar merupakan salah satu peringkat tertinggi untuk angka stunting di Provinsi Riau sebesar (31,99%). Tujuan penelitian ini adalah menganalisis bagaimana program promosi kesehatan dalam pencegahan stunting di Puskesmas Salo. Penelitian menggunakan metode kualitatif analitik yang dilakukan di Puskesmas Salo kepada 4 orang informan meliputi pemegang promkes, pemegang gizi. Ibu yang memiliki anak stunting dan Kepala Puskesmas. Hasil penelitian menunjukkan secara umum pelaksanaan program promkes di Puskesmas Salo telah berjalan, namun terdapat kendala seperti masih terbatasnya sumber anggaran dalam mendukung pelaksanaan program promkes di Puskesmas Salo. Disarankan kepada Puskesmas Salo untuk dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi program promosi Kesehatan di Puskesmas Salo sesuai dengan kapasitas anggaran.

Kata Kunci: Anggaran, Promkes, Puskesmas,

A. Pendahuluan

Masalah anak pendek (*Stunting*) merupakan salah satu permasalahan gizi yang dihadapi di dunia, khususnya di negara-negara miskin dan berkembang (Unicef, 2013). Stunting atau pendek adalah salah satu bentuk kekurangan gizi. Banyak orang berpikir bahwa tinggi seorang anak bergantung pada faktor genetik (keturunan) dan tidak banyak yang dapat dilakukan untuk mencegah atau memperbaikinya. Sebenarnya pendek adalah kondisi serius yang terjadi saat seseorang tidak mendapatkan asupan bergizi dalam jumlah yang tepat dalam waktu yang lama

(kronik), sehingga stunting dapat dicegah dengan asupan gizi yang memadai, terutama pada 1000 hari pertama kehidupannya (Tpn2k, 2017).

Menurut Kemenkes Stunting adalah Status gizi seorang balita yang sudah diukur panjang badan dan tinggi badan menurut umur (PB/U dan TB/U) lalu dibandingkan dengan standar baku WHO – MGRS (Multicentre Growth Reference Study) tahun 2005, apabila nilai z-scorenya kurang dari -2SD dan -3SD. Stunting tidak hanya mempengaruhi kognitif tapi juga akan mempengaruhi pertumbuhan dan pembangunan suatu negara karena akan mengakibatkan berkurangnya sumber daya manusia yang berkualitas.

Periode yang sangat kritis bagi pertumbuhan dan perkembangan anak dipengaruhi oleh status gizi ibu pada saat pra hamil, kehamilan dan saat menyusui. Gerakan 1000 Hari Pertama Kehidupan (1000 HPK) atau periode emas (golden periode) adalah periode yang dimulai sejak terjadinya konsepsi sampai anak berusia 2 tahun yang terdiri dari 270 hari selama kehamilan dan 730 hari kehidupan pertama sejak bayi dilahirkan. Salah satu program yang terdapat dalam Gerakan 1000 Hari Pertama Kehidupan (1000 HPK) dalam upaya mencegah *stunting* adalah intervensi gizi spesifik dengan sasaran ibu hamil, ibu menyusui dan anak usia 0-23 bulan (Muthia, 2019). Kerangka intervensi *stunting* yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia terbagi menjadi dua, yaitu intervensi gizi spesifik oleh sektor kesehatan dan intervensi gizi sensitif oleh sektor non-kesehatan.

Berdasarkan hasil Riset Kesehatan Dasar tahun 2018, prevalensi *stunting* secara nasional tahun 2018 adalah 30,8 persen. Prevalensi tersebut terdiri dari 11,5% sangat pendek dan 19,3% pendek. Berdasarkan hasil Riskesdas Provinsi Riau tahun 2018 oleh Kementerian Kesehatan RI, angka kejadian balita *stunting* di Provinsi Riau sebanyak 25,7 %. Kabupaten Kampar merupakan salah satu peringkat tertinggi untuk angka *stunting* di Provinsi Riau sebesar (31,99%).

Kebijakan dan strategi penanggulangan *Stunting* di Indonesia dalam konvergensi pencegahan *stunting* di Desa yang dapat dilakukan oleh puskesmas yaitu konfirmasi status gizi, penentuan jumlah dan alokasi sasaran, lokakarya mini, dan perencanaan menu. Selanjutnya yang dapat dilakukan oleh Pustu atau Poskesdes, yaitu rekap data calon sasaran, konfirmasi sasaran, dan pembinaan. Dan yang dilakukan oleh Posyandu, yaitu pendataan, calon sasaran, tim PMBA, dan perencanaan pergerakan monev (Kemenkes RI, 2019).

Berdasarkan hasil wawancara survey awal yang dilakukan peneliti kepada pemegang program gizi dan promkes di Puskesmas Salo, peneliti mendapat informasi dari pemegang program gizi bahwa untuk tenaga gizi hanya ada 1 orang, kemudian dari pola asuh orang tua pemegang program gizi mengatakan bahwa masih ada ibu yang menyajikan makanan untuk anaknya tidak sesuai dengan yang telah dianjurkan oleh tenaga puskesmas, lalu pemegang gizi dan tenaga puskesmas lain juga telah melakukan pemberian makanan tambahan (PMT) bagi ibu hamil dan juga anaknya. Kemudian peneliti mendapat informasi dari pemegang promkes bahwa tenaga promkes 1 orang di puskesmas tersebut. Untuk penganggaran sudah tercukupi dari yang sudah ditetapkan oleh pemerintah karena Puskesmas tersebut masuk ke dalam Lokus *Stunting*. Program yang telah bagian Promkes lakukan dalam pencegahan *Stunting* hanya melakukan penyuluhan mengenai *Stunting* dan demo masak kepada masyarakat. Untuk media informasi pencegahan *Stunting* hanya disebarkan sewaktu dilakukan nya penyuluhan, untuk media di tempat umum seperti spanduk atau baliho mengenai pencegahan *Stunting* masih belum ada.

Tujuan umum penelitian ini adalah menganalisis bagaimana program promosi kesehatan dalam pencegahan *stunting* di Puskesmas Salo.

B. Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan desain penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian dilakukan di Puskesmas Salo tahun 2021. Variabel penelitian yaitu advokasi, pemberdayaan dan metode. Adapun informan yaitu pemegang promkes, pemegang program gizi, ibu yang memiliki anak stunting dan Kepala Puskesmas. Instrument penelitian menggunakan pedoman wawancara, lembar observasi. Analisis data dilakukan dengan cara Triangulasi.

C.Hasil dan Pembahasan

Pemberdayaan Masyarakat, Berdasarkan hasil wawancara terhadap 5 orang informan, diketahui pemberdayaan masyarakat sudah dilaksanakan. Bentuk pemberdayaan masyarakat yaitu melibatkan kader dalam kegiatan seperti pembagian PMT (Pemberian makanan Tambahan), namun dalam pelaksanaannya terkadang terkendala waktu dan keterbatasan tenaga. Karena pada umumnya baik tenaga gizi maupun promkes memiliki beban kerja ganda. Sementara itu pelaksanaan pemberdayaan masyarakat antara Puskesmas Bersama kader meliputi pendataan balita, pelaksanaan posyandu, menimbang balita, kader diberikan sosialisasi terkait stunting agar dapat disampaikan ke masyarakat.

Advokasi, Berdasarkan hasil wawancara terhadap 3 orang informan, diketahui petugas Puskesmas telah melakukan advokasi kepada pembuat kebijakan dalam hal ini Kepala Desa, camat. Pelaksanaan advokasi oleh puskesmas secara lintas sektor kepada Camat dan Lurah dalam rang meminta dukungan dana.

Metode, Berdasarkan hasil wawancara terhadap 3 orang informan, diketahui metode yang digunakan Puskesmas dalam pencegahan stunting yaitu penyuluhan yang dilakukan baik di Puskesmas maupun di Posyandu serta pembagian PMT

1.Pemberdayaan Masyarakat

Hasil penelitian dari wawancara mendalam kepada 3 informan, diketahui pemberdayaan masyarakat sudah dilaksanakan. Bentuk pemberdayaan masyarakat yaitu melibatkan kader dalam kegiatan seperti pembagian PMT, namun dalam pelaksanaannya terkadang terkendala waktu dan keterbatasan tenaga. Karena pada umumnya baik tenaga gizi maupun promkes memiliki beban kerja ganda.

Diketahui pemberdayaan masyarakat di Puskesmas Salo terkait program promosi Kesehatan dalam pencegahan stunting sudah berjalan. Namun dalam pelaksanaan mengalami keterbatasan karena adanya beban kerja ganda. Hal ini berdasarkan surat keputusan menteri kesehatan nomor 1114/Menkes/SK/VII/2005 tentang pedoman pelaksanaan promosi kesehatan di daerah. Pemberdayaan masyarakat yang dilakukan petugas Kesehatan merupakan suatu upaya penggerakan atau pengorganisasian di masyarakat, Penggerakan atau organisasi masyarakat diawali dengan membantu kelompok masyarakat mengenai masalah - masalah yang mengganggu kesehatan sehingga masalah tersebut menjadi masalah bersama, kemudian masalah tersebut dimusyawarahkan untuk dipecahkan secara Bersama-sama, dari hasil pemecahan masalah tersebut tentunya masyarakat melakukan upaya - upaya agar masalah tersebut tidak menjadi masalah lagi. Dalam pelaksanaan pemberdayaan masyarakat diperlukan kemampuan komunikasi interpersonal yang baik dalam memberdayakan kader. Sehingga kader dapat menjalankan fungsinya sebagai perpanjangan tangan Puskesmas, khususnya dalam upaya pencegahan stunting.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Tampubolon (2020) tentang kebijakan intervensi penanganan stunting terintegrasi, diketahui sebagai upaya intervensi dalam pencegahan stunting diperlukan adanya upaya pemberdayaan masyarakat dengan mengoptimalkan peran kader. Pemberdayaan masyarakat memainkan peran penting dalam program penanggulangan stunting karena memungkinkan partisipasi aktif dari individu, keluarga, dan komunitas dalam proses pengambilan keputusan, perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan program.

Menurut asumsi peneliti, dalam pelaksanaan pemberdayaan masyarakat sebagai upaya pencegahan stunting perlu adanya kerja sama lintas program khususnya tenaga gizi dan promkes. Kader sebagai perpanjangan tangan Puskesmas perlu diberikan sosialisasi dan pengetahuan agar dapat menjalankan perannya dalam upaya pencegahan stunting. Dengan menerapkan pemberdayaan masyarakat dalam program penanggulangan stunting, diharapkan dapat menciptakan perubahan yang berkelanjutan dalam pola makan, praktik perawatan kesehatan, dan kondisi lingkungan, yang pada akhirnya akan membantu mengurangi angka stunting dan meningkatkan kesejahteraan anak-anak dan keluarga.

2.Advokasi

Hasil penelitian dari wawancara mendalam kepada 3 informan, diketahui petugas Puskesmas telah melakukan advokasi kepada pembuat kebijakan dalam hal ini Kepala Desa, Camat. Pelaksanaan advokasi oleh puskesmas secara lintas sektor kepada Camat dan Lurah dalam rangka meminta dukungan dana.

Advokasi merupakan suatu upaya atau tahapan yang direncanakan untuk mendapatkan komitmen serta dukungan dari pihak - pihak yang terkait baik itu tokoh - tokoh masyarakat informal maupun yang formal agar masyarakat di lingkungan puskesmas berdaya untuk mencegah serta meningkatkan kesehatan serta menciptakan lingkungan yang sehat. Pelaksanaan advokasi oleh Puskesmas Salo dalam rangka pencegahan stunting sudah dilakukan. Advokasi dilakukan dengan sasaran kepada Kepala Desa, Camat dengan tujuan untuk mendapatkan dukungan. Advokasi membantu meningkatkan kesadaran masyarakat, pemangku kepentingan, dan pembuat kebijakan tentang pentingnya penanggulangan stunting. Melalui kampanye informasi dan edukasi, advokasi dapat memperkuat pemahaman tentang dampak stunting pada kesehatan dan perkembangan anak serta konsekuensi jangka panjangnya terhadap masyarakat dan ekonomi. Melalui advokasi, dapat ditekan untuk pengalokasian sumber daya yang memadai untuk program-program penanggulangan stunting. Ini termasuk alokasi anggaran untuk gizi dan kesehatan anak, akses terhadap air bersih dan sanitasi yang layak, serta dukungan untuk layanan kesehatan maternal dan anak yang berkualitas.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Sewa (2019) tentang Pengaruh Promosi Kesehatan terhadap Pengetahuan dan Sikap dengan Tindakan Pencegahan Stunting oleh Kader Posyandu di Wilayah kerja Puskesmas Bailang Kota Manado, diketahui dalam upaya promosi Kesehatan pencegahan stunting diperlukan kerja sama lintas sektor dan upaya advokasi kepada pembuat kebijakan dalam angka dukungan.

Menurut asumsi peneliti, pelaksanaan program pencegahan stunting diperlukan dukungan dari pembuat kebijakan dalam hal ini Camat, kepala Desa. Dukungan tersebut dapat berupa dukungan kebijakan, dana. Sehingga pelaksanaan pencegahan stunting dapat berjalan secara efektif.

3.Metode

Hasil penelitian dari wawancara mendalam kepada 4 informan, diketahui petugas Puskesmas menggunakan metode pencegahan stunting yaitu penyuluhan yang dilakukan baik di Puskesmas maupun di Posyandu serta memaksimalkan peran kader.

Metode dalam pencegahan stunting di Puskesmas ini adalah metode komunikasi berupa penyuluhan Kesehatan kepada masyarakat. Hal ini berdasarkan surat keputusan menteri kesehatan nomor 1114/Menkes/SK/VII/2005 tentang pedoman pelaksanaan promosi kesehatan di daerah. Dalam pelaksanaan promosi Kesehatan pada dasarnya meliputi pemberdayaan, bina suasana dan advokasi merupakan suatu proses komunikasi. Adapun dalam proses komunikasi tersebut diperlukan suatu metode. Dalam pemilihan metode penting untuk memperhatikan siapa sasaran.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Putri (2017) tentang Evaluasi Pelaksanaan Program Gizi yang berkaitan dengan Kejadian Stunting (Tubuh Pendek) di Kabupaten Indramayu Tahun 2017, diketahui metode komunikasi seperti penyuluhan bertujuan menambah wawasan dan merubah pola pikir khususnya mengenai pencegahan stunting.

Menurut asumsi peneliti, Dalam program penanggulangan stunting, pemilihan metode atau pendekatan yang tepat sangat penting untuk mencapai hasil yang optimal. Metode membantu dalam menentukan intervensi atau tindakan yang paling efektif dalam mengurangi stunting. Pelaksanaan program pencegahan stunting diperlukan metode komunikasi yang tepat dan sesuai dengan sasaran. Penyuluhan Kesehatan dengan memanfaatkan media yang tepat dapat memaksimalkan pelaksanaan pencegahan stunting di Puskesmas Salo.

D.Penutup

Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan bahwa pelaksanaan kegiatan promosi kesehatan sudah terlaksana sebagai langkah pencegahan stunting. Namun terdapat beberapa

hal yang belum berjalan efektif diantaranya kegiatan pemberdayaan masyarakat yang terkadang terkendala waktu dan keterbatasan tenaga, Sehingga disarankan kepada Puskesmas Salo dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi program promosi Kesehatan di Puskesmas Salo sesuai dengan kapasitas anggaran serta beban kerja.

Daftar Pustaka

- Astuti, Sri. dkk. (2018). *Gerakan Pencegahan Stunting Melalui Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan Jatinangor Kabupaten Sumedang*. Jurnal Aplikasi Ipteks Untuk Masyarakat, 7 (3), 185-188.
- Direktorat Jendral Kesmas Kementerian Kesehatan. (2018). *Pedoman Strategi Komunikasi Perubahan Perilaku Dalam Percepatan Pencegahan Stunting di Indonesia*.
- Kemenkes RI. (2019). *Laporan Risesdas 2018*. Jakarta: Kemenkes RI.
- Muthia, Gina. dkk. (2019). *Evaluasi Pelaksanaan Program Pencegahan Stunting Ditinjau Dari Intervensi Gizi Spesifik Gerakan 1000 HPK di Puskesmas Pegangbaru Kabupaten Pasaman*. Jurnal Kesehatan Andalas, 8 (4), 100-108.
- Notoatmodjo, S. (2018). *Promosi Kesehatan dan Perilaku Kesehatan*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Putri, Riezka Diana. dkk. (2018). *Evaluasi Pelaksanaan Program Gizi Yang Berkaitan Dengan Kejadian Stunting (Tubuh Prndek) di Kabupaten Indramayu Tahn 2017*. Jurnal Kesehatan Indra Husada, 6 (1), 31-38.
- Puskesmas Salo. (2020). *Data Hasil Rekap Balita Berdasarkan Status Gizi dan Usia di Puskesmas Salo Tahun 2019*.
- Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K). (2018). *Strategi Nasional Percepatan Pencegahan Stunting 2018-2024*.